

## PROFIL KEPEMIMPINAN POLRI DI KEWILAYAHAN

Hasil wawancara majalah 'Bhayangkara dengan Mayor Jenderal Polisi  
Drs. H. Poedy Syamsoesdin. \*)



### PENDAHULUAN

Setiap Pimpinan di lingkungan ABRI/POLRI bertanggung jawab atas pelaksanaan 'Sebelas Asas Kepemimpinan ABRI' serta 'Tujuh Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial ABRI'. Tantangan dan tuntutan jaman sebagai akibat akselerasi pembangunan yang mengadptasikan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin meningkat dan meluas sehingga setiap Pimpinan bertanggung jawab pula mengantisipasi tantangan dan tuntutan tersebut, yang menghasilkan aktualisasi wajah-wajah/profil Pimpinan tersebut. Profil kepemimpinan di kewilayahan mulai dari Pos,

operasional, Resort, Wilayah, sampai dengan Daerah Kepolisian, tercermin dari aktualisasi, penerapan, serta pengembangan asas-asas kepemimpinan tersebut diatas, sesuai dengan lingkup, dinamika kewilayahan, dan bobot ketajaman ketanggapan pemimpin/pimpinan setempat.

Dalam kenyataannya terbukti bahwa antisipasi kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip penuntun KAPOLRI 'O-E-C-O' (Open, Etis, 'Crime-hunter', Ojo Dumeh) tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, yakni 'Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling' (POAC) sebagai tatanan sirkulasi yang terus berkembang. Termasuk di dalamnya antisipasi dalam wujud aktualisasi Kendali (Control) dalam kegiatan Pengawasan Melekat (Waslekat) yang dicanangkan oleh Pimpinan Nasional melalui Men Pan Ir. Sarwono Kusumaatmadja.

Permasalahan yang mendesak bagi POLRI ialah bagaimana kepemimpinan itu akan diterapkan secara pragmatis, proporsional, serta profesional, sesuai stratifikasi

ada. Dan karena adanya berbagai kendala yang mendesak, kecermatan untuk mem'prioritas'kan asas-asas kepemimpinan terapan merupakan hal yang mendesak pula. Dalam kaitan inilah butir-butir kepemimpinan POLRI di kewilayahan kami gali dari seorang pakar praktisi pragmatisme kepemimpinan, Jenderal Poedy yang sekaligus mewakili para Pejabat Kewilayahan Senior POLRI dewasa ini, untuk kita kaji kembangkan bersama untuk hari ini serta hari esok.

## AKTUALISASI ASAS—ASAS

Dalam sekitar 40 menit menunggu kesediaan Jenderal Poedy sebagai nara sumber untuk menerima kami, lebih dari sepuluh kali tetamu serta staf keluar masuk yang membuat kami berupaya mengajukan pertanyaan secara lugas. Ternyata tatkala kami diperilahkan masuk, segala formalitas dan ketegangan yang tertekan tiba-tiba lenyap oleh keakrabannya namun yang juga penuh pancaran keseriusan. Kelengkapan wawancara segera kami siapkan.

Wawancara diawali dengan permintaan maaf nara sumber yang karena kepadatan dan variasi dinamika kegiatannya baik di Polda maupun di tengah instansi serta di kewilayahan maka permintaan redaksi 'Bhayangkara' untuk menulis makalah terpaksa tidak dapat dipenuhi. Atas pertanyaan *di kewilayahan kesebelas asas serta ketujuh asas kepemimpinan/kepemim-*

*pinan dan komunikasi sosial ABRI tersebut wajib diterapkan oleh setiap pimpinan. Bagaimanakah persepsi Jenderal Poedy atas masing-masing asas dimaksud dikaitkan dengan penggantiannya tergali dari pengalaman di berbagai bidang dan kewilayahan, dijawab sebagai berikut :*

Pada dasarnya baik 11 Asas Kepemimpinan, maupun 7 Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial ABRI secara keseluruhan yang bulat harus dilaksanakan. Namun demikian, setiap pimpinan di kewilayahan harus pula pandai menempatkannya secara proporsional, sesuai bobot aplikasi yang diyakininya. Dan dari penerapan yang selama ini selalu dikaji ulang maka dapat ditarik butir-butir pengertian dari ke-18 asas dimaksud.

### A. Sebelas Asas Kepemimpinan ABRI.

**Asas TAQWA.** Asas ini pada hakekatnya merupakan perpaduan yang serasi serta konsisten antara apa yang diyakininya dengan amalan ibadah oleh segenap pemeluk agama dan kepercayaan di kewilayahan. Di sini peranan keteladanan pimpinan selaku insan beragama yang baik, benar-benar mempunyai dampak positif yang luas serta mendalam terhadap lingkungan tempat kita bertugas.

Peranan keteladanan ini sedemikian pentingnya terbukti dengan dicerminkannya kembali dalam asas

kedua sampai keempat, yang kita tahu pada dasarnya tidak terlepas dari landasan yang diletakkan oleh tokoh Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro.

**Asas ING NGARSO SUNG TULODO.** Asas 'di depan anak buah, menjadi suri teladan' ini harus diartikan 'satunya kata dengan perbuatan'. Hingga kini masih banyak Pimpinan POLRI di kewilayahan yang mempraktekkan sistem 'dengar kata-kataku, tapi jangan lihat perbuatanku'. Contoh yang paling nyata dan sering ialah dalam upaya penegakan hukum dan kepatuhan berlalu-lintas. Siapapun dan apapun pangkat/kedudukannya, termasuk Ka Polda Metro Jaya bila berpakaian preman di jalanan umum, wajib patuh diperiksa surat-surat kendaraannya dan seterusnya, walaupun hanya oleh seorang Kopral Polantas sekalipun.

**Asas ING MADYO MANGUN KARSO** berarti bahwa setiap Pimpinan harus mampu mendinamisir lingkungannya. Dia sekaligus wajib mampu 'memberikan warna' kepada lingkungan kerjanya, yang sekaligus pula mampu menjawab tuntutan masyarakat lingkungannya.

**Asas TUT WURI HANDAYANI** sebagai asas keempat ini berstrata luas. Hakekat 'memberikan dorongan dari belakang' berarti mampu mengembangkan dinamika positif dari bawah guna mengembangkan sistem dengan pola 'dari bawah ke atas' (bottom-up pat-

tern of leadership). Asas ini apabila diaktualisasikan secara proporsional akan menghilangkan pola sikap 'merasa pandai sendiri' yang ditinjau dari hasilnya sangat tidak mendukung pelaksanaan tugas di kewilayahan tingkat apapun. Potensi anak buah dan lingkungan jangan diabaikan untuk digali dan didayagunakan.

Berbicara tentang asas **WASPADA PURBA WISESA** perlu ditekankan bahwa setiap Pimpinan, Atasan, atau Komandan wajib berdiri tegar selaku pengamat yang 'observant' (cepat-cermat-tepat). Dengan begitu ia benar-benar mampu menerapkan prinsip tuntunan Kapolri 'open', guna menangkal segala kemungkinan yang tidak dikehendaki disertai analisis dan evaluasi yang tidak pernah mandeg/berhenti.

Nara sumber selanjutnya memberikan paparan asas ke-6 dikaitkan dengan asas ke-9 yakni **AMBEG PARAMA ARTA** dan **GEMINASTITI**. Berpijak pada manajemen modern, kita harus melangkahkan kepemimpinan kita pada kenyataan yang mendasar, yakni kecenderungan langkanya sumber daya/sumber dana (scarcity of resources) guna menentukan prioritas kegiatan. Kedua asas ini akan mampu melaksanakan selektivitas kegiatan yang berdaya serjita berhasil guna (efficient & effective). Jangan sampai, misalnya sebuah Polsek minta helikopter khusus untuk kewilayahannya.

Asas PRASAJA sudah jelas. Pola hidup sederhana yang dimasyrakatkan oleh Presiden Suharto harus mewarnai kehidupan kepemimpinan setiap kewilayahan.

Selanjutnya tentang asas SATYA. Asas ini telah menjadi salah satu tekad POLRI untuk ber-SATYA HAPRABU sesuai prasyarat pertama CATUR PRASETYA POLRI. Satya di kewilayahan mempunyai dimensi ke atas, ke samping, serta ke bawah. Berpola TRIMATRA. Loyalitas ke atas harus menjauhi tendensi bahwa untuk maju, dipakai 'segala cara' antara lain dengan menyikut sesama rekan. Juga jangan sekali-kali berpesta pora di atas keprihatinan anak buah. Apabila tokoh ini dilaksanakan, rasa hormat sesama rekan dan bawahan cepat atau lambat pasti menipis, dan akibatnya Pimpinan akan kehilangan wibawa.

Sebagai atasan kita harus berpegang teguh kepada prinsip 'only the commander is responsible'. Mekanisme disposisi 'U.s.p.' misalnya harus dibatasi karena cenderung berdampak 'cuci tangan dari tanggung jawab'.

#### Asas ke-10 BELAKA (BLOKO).

Selain bermakna bersahaja dan berterus terang, juga bermakna lugas (zakelijk) tanpa melupakan nilai-nilai kultural lingkungannya. Kultur lingkungan ini wajib kita perhatikan dengan saksama, digali dari Anthropologi Budaya setempat.

Terakhir Jenderal Poedy dengan cepat menyebut dan menjelaskan asas ke-11 LEGAWA. Menurut nara sumber, asas ini pada hakekatnya merupakan kepemimpinan yang dilandasi sikap mental 'siap untuk diganti setiap saat'. Sikap siap mundur dari jabatan ini perlu dipersiapkan secara dewasa agar tidak terjadi sikap 'mumpung' lalu berbuat 'neko-neko' (aneh-aneh, macam-macam) yang pada saatnya amat merugikan diri sendiri serta lingkungannya. Pimpinan yang demikian telah menyia-nyiaikan waktu untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya nara sumber dengan fasih menyitir bunyi Surat AL-ASH yang menyatakan bahwa 'Demikian masa/waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dan saling menasihati agar mentaati kebenaran serta kesabaran'. Dalam kaitan ayat Al-Qur'an ini ditegaskan oleh Jenderal Poedy, berlaku di agama apapun, manusia akan benar-benar rugi manakala hidupnya tidak diisi dengan perbuatan yang baik serta yang bermanfaat.

#### B. Asas-asas dalam Tujuh Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial ABRI.

Asas pertama KONSTITUSIONAL mengisyaratkan adanya keterkaitan kelembagaan CATUR SAKTI dalam penegakan perundang-

undangan yang sah.

Kemudian **asas PENCEGAHAN** atau preventif harus kita beri konotasi dalam arti luas; tidak sekedar pencegahan terhadap timbulnya kejahatan belaka. Hal ini sering diabaikan oleh pimpinan POLRI di kewilayahan ditambah lagi dengan tiadanya kontak dengan para tokoh kepemimpinan daerah/tokoh masyarakat. Semboyan yang berakar kuat di Sumatra Barat, yakni 'dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung' sebenarnya sangat menguntungkan untuk diterapkan di kewilayahan manapun, untuk mendayagunakan lingkungan kerja kita guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Khusus ke dalam, tindakan represif/hukuman terhadap bawahan harus bersifat mencegah agar tindakan yang berdampak lingkungan negatif tidak berulang kembali oleh si terpidana tadi. Sebaliknya, ini yang sering dilupakan oleh Pimpinan ialah perlunya mulai dilembagakan 'merit system' di mana kepada yang telah berjasa kita beri perangsang untuk menggairahkan ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya pencegahan dari pelanggaran disiplin serta tindak pidana lain.

**Asas KEMANUSIAAN.** Asas ini berarti bahwa perlakuan terhadap anggota harus manusiawi, dan segala keputusan hendaknya berupa hukuman yang disemangati oleh 'tepo saliro' atas segala hukuman yang akan dijatuhkan kepa-

da anak buah.

**Asas KEKELUARGAAN dan KEGOTONG ROYONGAN, SUDAH JELAS.**

**Asas MENDIDIK UNTUK MENANAMKAN KEMAMPUAN** kita kenal dengan istilah edukatif. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas preventif, yang didalamnya pimpinan harus selalu mengambil hikmah dari setiap pengalaman/peristiwa negatif yang terjadi di di kewilayahannya.

Asas keenam adalah **PENGAYOMAN YANG MELINDUNGI MASYARAKAT.** Masyarakat di sini dimaksudkan baik masyarakat intern ABRI/POLRI di jajaran kewilayahannya maupun masyarakat luas pada umumnya. Ke dalam, seorang pimpinan harus berpegang pada prinsip bahwa siapa bersalah harus diberi sanksi guna merangsang tanggung jawabnya. Misalnya dalam kasus 'anak buah menghilangkan senjata api' atau 'bawahan kawin lagi tanpa ijin sah'. Dalam kasus demikian seorang pimpinan wajib mempertimbangkan apa golongan (Tamtama, Bintara, ataukah Perwira) si pelaku dan apa latar belakang kejadiannya. Pada prinsipnya selain hukuman yang akan dijatuhkan itu edukatif, juga yang bersifat meringankan, dan dampak hukuman itu masih cukup layak untuk memberikan kesempatan untuk tidak jatuh diimpit tangga pula.

Di sinilah letak makna pengayoman dan perlindungan itu, sepanjang yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda bersedia memperbaiki diri. Dan, ini yang terpenting, kehadirannya selaku Pimpinan POLRI Kewilayahan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai 'tidak percuma'.

Drs. Poedy tercenung sejenak, dan setelah selesai memandangi langit-langit ruang kerjanya yang luas dan segar itu kembali memandangi kami sambil meneruskan pemaparannya :

Asas terakhir yakni **PERSUASIF**, selama ini terasa lebih banyak diperkatakan/diomongkan dibandingkan diaktualisasikan; padahal bagaimana mempersuasi orang lain (*how to persuade others*) ini amat penting agar orang lain mau secara yakin dan bertanggung jawab melaksanakan apa yang kita kehendaki. Dengan mendayagunakan **HUKUM** dan **SISTEM GANJARAN** (*merit system*) yang menyertai persuasi tersebut akan memperoleh bobot keberhasilan tersendiri. Perintah-perintah imperative seperti dalam **SISKAMLING** misalnya, apabila telah kita laksanakan berdasarkan pertimbangan keenam asas tersebut di depan dan mempertimbangkan kreativitas serta inisiatif bawahan dan atau masyarakat luas secara 'bottom-up', maka **SISKAMLING** selain tidak dianggap beban atau paksaan, menjadi diyakininya sebagai suatu kebutuhan dan tanggung jawab bersama. Asas ini

memang memerlukan dukungan pembinaan serta dukungan administrasi (dana), yang walaupun minim wajib kita kembangkan serta upayakan keberhasilannya.

## ILMU KOMUNIKASI DAN ANTHROPOLOGI BUDAYA

Menjawab pertanyaan *dapatkah aplikasi kesebelas dan ketujuh asas kepemimpinan tersebut diberlakukan sama (seragam) di seluruh kewilayahan di Indonesia*, Jenderal Poedy menyatakan bahwa pada dasarnya bisa, akan tetapi bobot/konotasi penerapannya harus memperhatikan serta menyesuaikan diri dengan nilai kultur batiniah setempat. Tampilah peranan untuk mendayagunakan Ilmu Komunikasi. Seorang Pimpinan POLRI Kewilayahan wajib menjadi **KOMUNIKATOR** yang baik untuk merealisasikan **PESAN** (*message*) melalui **MEDIA** yang tepat guna meyakinkan **KOMUNIKAN** (*pihak lain, communcant*) dengan rela/yakin/bertanggung jawab menerima/melaksanakan pesan tersebut, sehingga **SARAN** (*goal, objectives*) si komunikator tercapai. Untuk ini kultur dan watak dasar kewilayahan yang kita pimpinan harus kita kenal dan hayati dengan baik. Misalnya di masyarakat Jawa Tengah, bagaimana kita menghayati dan mendayagunakan kultur dan watak dasar orang Jawa yang menyukai makan an yang serba manis, yang orang-orang tuanya (*pinisepuh*) perlu 'dibopong dan dipangku'. Juga di

Sumatra Barat, dimana peranan "Ninik Mamak" begitu dominan sehingga ikatan komunikatif perlu diikat erat sesuai pepatah 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'.

Jelas, demikian nara sumber memberikan penekanan, bahwa antara kita sebagai komunikator dengan masyarakat sebagai komunika, diperlukan kontak batin.

Menjawab pertanyaan *nampaknya pada dasarnya kepemimpinan di lapangan tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen yang kita kenal dengan nama 'POAC'. Prinsip dan langkah manakah yang menurut Jenderal perlu mendapatkan prioritas ?*, langsung ditegaskan bahwa keempat-empatnya sebagai suatu sirkulasi harus dilaksanakan.

Mengapa, karena setiap pimpinan itu IBARAT SEORANG PILOT, ulangi seorang pilot, sehingga sebelum mengoperasikan pesawatnya (baca : kepemimpinan kewilayahannya) secara frontal harus mengadakan 'checking & rechecking' sampai memperoleh keyakinan untuk 'bisa start/tinggal landas'. Untuk itu setiap saat LAPORAN KEMAJUAN (LAPJU) KEWILAYAHAN bersumber dari fungsi-fungsi yang ada harus kita baca, analisis, serta evaluasi guna perencanaan operasional berikutnya. Kepemimpinan di sini ibarat 'a never ending process of management' sesuai lingkup/stratifikasi kewilayahannya. Dan di atas segalanya, demikian Jenderal Poedy sambil memutar pandang-

annya seperti bicara di depan pasukan, FUNGSI KONTROL agaknya perlu kita beri perhatian yang khusus. Baik dalam wujud SUPERVISI maupun KONTROL KENDALI murni. Tanpa kontrol kendali yang baik maka laju jalannya manajemen sudah pasti kurang memenuhi tuntutan jaman.

Selanjutnya tatkala kami sela dengan pernyataan bahwa *kalau demikian selama ini Jenderal telah melaksanakan 'waslekat' tersebut di kewilayahannya . . . .*, langsung ditolaknya dengan menyatakan, bahwa nara sumber tidak mengatakan demikian, tetapi setidaknya fungsinya kontrol yang selama ini dilaksanakannya sudah mengarah ke WASLEKAT tersebut.

Waslekat ini akan terealisasi man-tap apabila prinsip 'open' serta 'waspada purba wisesa' sebagaimana diaktualisasikan oleh pilot tadi diterapkan dengan saksama.

Tetapi pengawasan di sini harus dilaksanakan 'berjenjang/berlapis' serta bertahap sesuai dengan stratifikasi kewilayahannya/komandonya, sehingga jelas 'who controls who'-nya. Jadi, Kapolres selain melakukan pengawasan struktural serta fungsional adalah juga pengawas para Kapolsek, dan para Kapolsek adalah pengawas para Ka Pospolnya. Hanya dengan pola pengawasan demikian maka mekanisme kepemimpinan/manajemen yang memenuhi tuntutan dan tantangan jaman sekarang ini dapat tercapai.

*Waslekat yang bagaimana yang menurut Jenderal Poedy sangkil dan mangkus ?*

Nara sumber tidak langsung memberikan rumusan, tetapi memberikan penekanan bahwa Waslekat menuntut dimilikinya kualifikasi seorang pimpinan yang tidak hanya bertindak serta diperlakukan sebagai *pelaksana*, tetapi juga sebagai *pengawas*. Jadi benar, bila dinyatakan bahwa setiap atasan adalah pengawas. Sinyalemen yang terpantau selama ini ialah masih banyak pimpinan yang kurang korektif, kurang bertanggung jawab dengan cenderung 'membiarkan' bawahan berbuat salah'.

Sinyalemen lain ialah apabila ada kesalahan terjadi di kewilayahan, proses korektif yang seharusnya dilaksanakan di kewilayahan, 'dilepas' untuk diproses di tingkat yang lebih tinggi atau di tingkat Markas Besar. Apabila hal ini tidak cermat/diwaspadai maka aktualisasi pengawasan demikian akan berakibat kendornya hakekat pengawasan melekat di kewilayahan, yang menurut nara sumber sebagai Waslekat yang sangkil dan mangkus tadi.

Drs. Poedy yang masih menyebut kedua istilah baru itu dengan efektif dan efisien selanjutnya mengiyakan kesimpulan partial majalah 'Bhayangkara' bahwa *dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta berbangsa, maka aplikasi kepemimpinan Polri di kewilayahan*

*pada hakekatnya harus merupakan jabaran kepemimpinan Pancasila, yang di dalamnya tersirat terciptanya situasi dan kondisi yang selaras, serasi dan seimbang.*

## SEBUNGKAH HARAPAN

Jenderal Poedy nampak lebih berhati-hati namun mengalir lancar menjawab pertanyaan kami terakhir : *sebagai pemantap khususnya digali dari begitu banyak pengalaman Bapak di kewilayahan yang bervariasi budayanya, dapatkah Bapak memberikan tambahan pesan serta himbauan kepada para pimpinan Polri di kewilayahan pada dekade mendatang ?*

1. Kita harus semakin sering mawas diri, sering berkaca diri, baik lahiriah maupun batiniah. Langkah kongkrit berkaca di depan cermin kantor demi kerapian dan disiplin itu pada hakekatnya mengandung 'ungkapan pembiasaan diri untuk mawas diri' tersebut.

2. Jangan menganut paham 'Rutinisme'; untuk menjadi Pimpinan yang lebih 'open' dan bisa menjadi POLRI yang 'observant' maka kepemimpinan di daerah harus selalu dibarengi dengan kegiatan analisis serta evaluasi atas segala perkembangan lingkungan kita.

3. Kita wajib lebih terbuka dan mau mendengar pendapat aspiratif bawahan, rekan, serta tokoh-tokoh lingkungan tempat kita bertugas.

4. Makna 'tanggap' harus bermakna tahu, yang dilanjutkan dengan langkah-langkah yang cermat.



Dan prinsip-prinsip manajemen modern yang menyangkut kelangkaan dukungan (scarcity of resources) harus dipegang teguh sehingga apa yang akan kita aktualisasikan akan :

- a. Lebih 'reasonable' dalam perencanaan.
- b. Lebih mantap dalam aktualisasinya, termasuk prinsip man-cukup-cukupnya anggaran ('ngajejuhkeun' balanja').
- c. Lebih proporsional kontrol kendalinya menuju efisiensi dan efektivitas manajemen.

5. Hambatan aplikasi yang paling mendesak untuk diwaspadai saat sekarang ini adalah :

- a. Kurangnya kita memperhatikan aspirasi masyarakat yang begitu heterogen, terus berkembang, yang didalamnya tersirat adanya tuntutan 'toleransi hidup beragama' serta mengamalkan semboyan 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'.
- b. Menghadapi dampak-dampak IPTEK yang berkembang kita masih sering lupa mendayagunakan pendekatan Anthropologi Budaya.
- c. Kita masih sering cepat puas. Rasa berhasil ini sangat merugikan dan menjurus kepada lunturnya kepekaan untuk ma-

was diri. Kita justru harus selalu merasa kurang, merasa masih perlu banyak belajar, bersikap 'bak ilmu padi/low profile', yang pasti membantu keberhasilan kepemimpinan dan karier kita untuk maju.

Terakhir, menjelang kami minta diri, Jenderal Poedy Samsuoddin menambahkan wawasannya, bahwa rasa percaya kepada diri sendiri itu baik, akan tetapi 'over confidence' di kewilayahan adalah kurang menguntungkan kepemimpinan kita. Apalagi 'rasa lebih' ini kita kaitkan dengan hakekat asas pertama Sebelas Asas Kepemimpinan ABRI, TAQWA.

'Bukankah kita ini hanya sesosok manusia biasa (human being), yang serba tidak kebal/steril/tahan menghadapi berbagai pengaruh, godaan, dan lain-lain (vulnerable), bukan?', ucapnya sambil berdiri menutup wawancara selama 70 menit bersama 'Bhayangkara'.—

Jakarta, Hari Bhayangkara 1988

Team 'Bhayangkara' :

M. Zein — Aswino.—

—oooOooo—

\* For murder, though it have no tongue, will speak  
With most miraculous organ.

(SHAKESPEARE)

\* Self confidence is the only course to the true glory.



**PTIK 42 TAHUN:** Hari Jadi atau hari didirikannya suatu Perguruan Tinggi lazim disebut "DIES NATALIS". Hari jadi tak pernah luput dari nilai sejarah serta maknanya. Oleh karena itu kerap kali beberapa perguruan tinggi dalam memperingati hari jadinya "dikaitkan" dengan wisuda sarjana. Dalam pada itu PTIK belum lama ini dalam Dies Natalis ke-42, juga mewisuda 123 Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXIII/Widya Pratidina. Mertoyudan 17 Juni 1946 merupakan titik awal kristalisasi nilai sejarah dan maknanya berlanjut ke Setjoningrat Yogyakarta, Diponegoro 68, Tambak 2, Ciputat 40, hingga sekarang di Tirtayasa 6.



*Pemberian gelar kesarjanaan Ilmu Kepolisian jangan hanya dijadikan dekorasi ilmiah, melainkan untuk diamalkan demi pengembangan integritas sebagai masyarakat ilmiah serta kemajuan ilmu Kepolisian bagi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Karena pada hakekatnya, masyarakatpun mengharapkan PTIK semakin berperan di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan kehidupan dalam arti luas. Kapolri mengemukakan hal itu pada Dies Natalis ke-42 PTIK yang "dikaitkan" dengan wisuda Mahasiswa PTIK Angkatan XXIII/Widya Pratidina.*

*(PHH)*





*MENUKIL RUJUKAN: Tentu penuh makna, mengapa Drs. ALFRED A. AMEIN, SH Alumni PTIK Angkatan III, yang juga lulusan Fakultas Hukum-UNTAG Jakarta menukil kembali rumusan "Ilmu Kepolisian", yang juga pernah dilontarkan oleh Drs. Subadi Sastrosudjono dalam Pidato Ilmiah tahun 1975, Dies Natalis PTIK ke-29. Paling tidak ada satu makna yang bermaksud untuk menjawab pertanyaan: "Apa Ilmu Kepolisian". Guna menentukan titik awal pembahasan dalam rangka analisa berikutnya sangat tepat diangkat suatu rumusan. Oleh karena dikemukakan rumusan pengertian Ilmu Kepolisian.*

*"Ilmu Kepolisian" ialah suatu ilmu yang mempelajari hal ikhwal Kepolisian, terutama:*

- 1. Segi hakekat ancaman dan gangguan KAMTIBMAS.*
- 2. Polisi sebagai fungsi dan organ.*
- 3. Dengan tujuan menghasilkan pelaksanaan tugas setinggi-tingginya.*

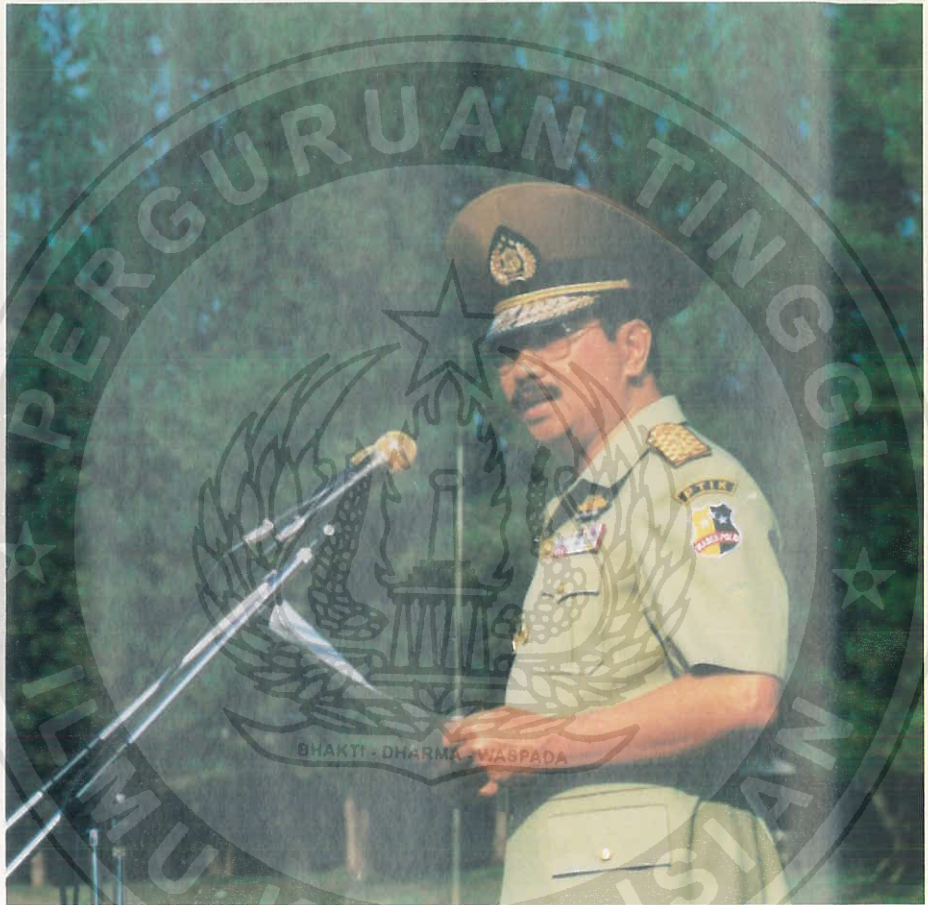
*Dalam pada itu tentu menarik memperbincangkan Hukum Medik yang lebih dikenal dengan sebutan Hukum Kedokteran ("MEDICAL LAW") adalah bagian dari Hukum Kesehatan. Dan perlu dipertanyakan apa bedanya dengan ilmu Kedokteran, Kehakiman dan apa kaitan dengan ilmu Kepolisian.*



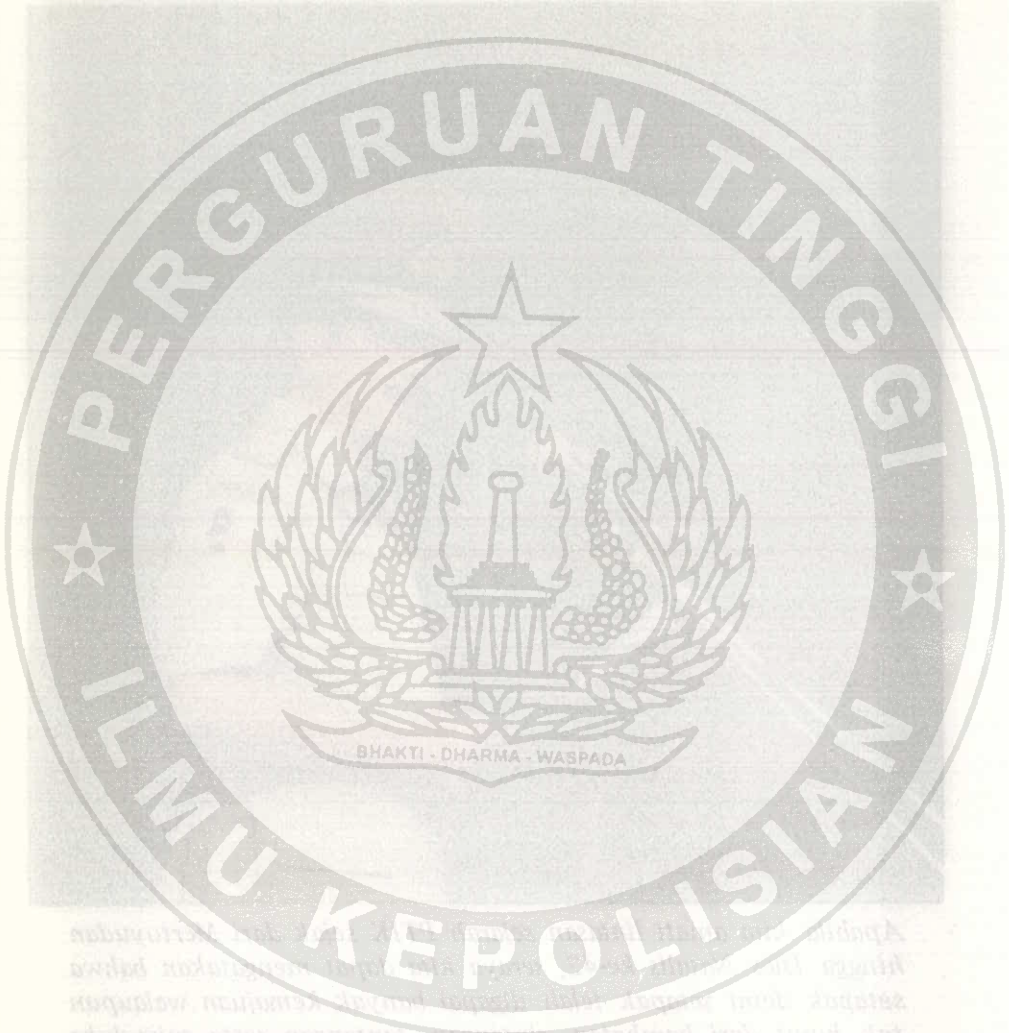
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

1. Segi bakti mencakup dan meliputi KAWIBMAS.  
2. Pahlawan sebagai pahlawan dan pahlawan.  
3. Dengan bakti dan pengabdian pelaksanaan tugas sebagai pahlawan.

Pada masa ini telah banyak yang beranggapan bahwa Polri yang telah dibesarkan dengan semangat bakti dan pengabdian sebagai pahlawan. Dan pada saat ini Polri telah menjadi pahlawan yang bakti dan pengabdian sebagai pahlawan.



*Apabila kita amati lintasan sejarah PTIK sejak dari Mertoyudan hingga Dies Natalis ke-42, seraya kita dapat mengatakan bahwa setapak demi setapak telah digapai banyak kemajuan walaupun tak luput dari hambatan, rintangan, tantangan serta suka-duka yang silih berganti. Namun kesemuanya memiliki hikmah dalam menjadikan PTIK tumbuh dewasa dan cekatan dalam penyesuaian diri terhadap tuntutan jaman. Seraya kita meyakini bahwa hal ini tidak lain karena ridho dari Tuhan YME, perhatian besar Pimpinan Polri, dedikasi dan kesungguhan dari para Dosen serta Staf dan tak ketinggalan pula partisipasi secara tulus para Alumnus. Semoga amal baik dalam rangka memajukan PTIK hingga Dies Natalis ke-42 akan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Pengasih.*



Apabila...  
khusus...  
sebagai...  
tak dapat...  
yang tidak...  
menyebabkan...  
dapat...  
ini...  
Prinsip...  
Setelah...  
Sebelum...  
No...